

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Isu lingkungan telah menjadi topik penting dalam hubungan internasional seiring dengan meningkatnya kesadaran global akan dampak perubahan iklim dan kerusakan lingkungan. Sejarahnya, perhatian terhadap isu lingkungan dalam konteks internasional mulai muncul pada pertengahan abad ke-20, ketika dampak industrialisasi dan urbanisasi mulai terasa secara global (Ivanova, 2021). Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Stockholm pada tahun 1972 sering dianggap sebagai titik awal penting dalam pengakuan internasional terhadap isu lingkungan. Konferensi ini menandai pengakuan bahwa masalah lingkungan tidak mengenal batas negara dan memerlukan kerjasama internasional untuk mengatasinya (United Nations, 1972).

Sejak saat itu, berbagai perjanjian internasional telah disusun untuk menangani isu lingkungan, termasuk Konvensi Kerangka PBB tentang Perubahan Iklim (UNFCCC) yang diadopsi pada tahun 1992 (Mitchell, 2003). Perjanjian ini menjadi fondasi penting dalam upaya mitigasi perubahan iklim dan adaptasi terhadap dampaknya. Selain itu, munculnya konsep 'greening of international relations' semakin menegaskan bahwa isu lingkungan telah menjadi bagian tak terpisahkan dari agenda politik internasional (Eckersley, 2021). Konsep ini mengakui bahwa tantangan lingkungan bukan hanya sebuah masalah ekologis, tetapi juga berhubungan erat dengan dinamika ekonomi, sosial, dan politik global, yang mendorong negara-negara untuk menyusun kebijakan yang mempertimbangkan keberlanjutan dalam berbagai sektor (Biermann & Pattberg, 2008).

Isu lingkungan telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari hubungan internasional, menciptakan kebutuhan untuk pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam dan mitigasi dampak perubahan iklim. Hal ini menuntut negara-negara untuk bekerja sama dalam merumuskan kebijakan yang

tidak hanya mempertimbangkan kepentingan nasional, tetapi juga tanggung jawab global terhadap keberlanjutan lingkungan (Biermann & Pattberg, 2008).

Mekong River Commission (MRC) berfungsi sebagai platform untuk kolaborasi antara negara-negara anggota, yaitu Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam, dalam merumuskan kebijakan yang mendukung pengelolaan sumber daya air yang berkelanjutan dan adaptasi terhadap perubahan iklim. Dengan inisiatif-inisiatif yang melibatkan pertukaran teknologi dan pengetahuan, MRC membantu negara-negara anggota untuk lebih efektif dalam memenuhi komitmen mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim (Kittikhoun & Staubli, 2018).

Sebagai contoh, *Mekong River Commission* (MRC) telah mengembangkan berbagai inisiatif dan proyek yang bertujuan untuk meningkatkan ketahanan iklim di Kawasan Sungai Mekong, termasuk pengelolaan risiko banjir dan kekeringan yang semakin meningkat akibat perubahan iklim. Dengan memfasilitasi pertukaran pengetahuan dan teknologi antara negara-negara anggota, MRC berkontribusi pada upaya kolektif untuk memenuhi komitmen yang diambil (MRC, 2021).

Sungai Mekong menjadi fokus penting dalam isu lingkungan di tingkat internasional karena perannya yang vital dalam mendukung keanekaragaman hayati, ketahanan pangan, dan keberlanjutan ekosistem. Sungai ini merupakan salah satu ekosistem paling produktif di dunia, menyediakan sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian, perikanan, dan hutan mangrove yang berfungsi sebagai penyangga terhadap perubahan iklim dan bencana alam. Namun, sungai ini juga menghadapi ancaman serius akibat perubahan iklim, pembangunan infrastruktur, dan pengelolaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan, yang semuanya memiliki dampak langsung pada lingkungan dan kehidupan masyarakat lokal. (Whitehead et al., 2019)

Pertama, perubahan iklim telah menyebabkan peningkatan frekuensi dan intensitas bencana alam, seperti banjir dan kekeringan, yang berdampak pada ekosistem Sungai Mekong. Penelitian menunjukkan bahwa kenaikan permukaan laut dan perubahan pola curah hujan dapat mengancam ketahanan pangan dan mengurangi produktivitas pertanian di kawasan ini. Selain itu, perubahan iklim juga mempengaruhi kualitas air dan keanekaragaman hayati di Sungai, yang dapat mengganggu ekosistem yang sudah rentan (Hoang et al., 2019).

Kedua, pembangunan infrastruktur, seperti bendungan dan proyek irigasi, sering kali dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak lingkungan yang lebih luas. Penelitian menunjukkan bahwa pembangunan bendungan di hulu sungai dapat mengurangi aliran sedimen yang penting bagi kesuburan tanah di Sungai Mekong, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi produksi pangan dan keberlanjutan ekosistem. Selain itu, pengelolaan sumber daya air yang tidak berkelanjutan dapat menyebabkan penurunan kualitas air dan hilangnya habitat bagi spesies ikan dan hewan lainnya yang bergantung pada ekosistem Sungai (Kondolf et al., 2018).

Ketiga, keanekaragaman hayati di Sungai Mekong sangat penting untuk mendukung kehidupan masyarakat lokal. Sungai ini merupakan rumah bagi berbagai spesies ikan, burung, dan tumbuhan yang berkontribusi pada ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Namun, aktivitas manusia yang merusak, seperti penebangan hutan dan pencemaran, telah menyebabkan penurunan keanekaragaman hayati yang signifikan, yang dapat mengancam keberlangsungan hidup masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam tersebut (Soukhaphon et al., 2021).

Selain itu, Sungai Mekong menjadi fokus penting dalam hubungan internasional karena perannya yang krusial dalam ekosistem, ekonomi, dan kehidupan sosial masyarakat di kawasan tersebut. Sungai Mekong merupakan salah satu sungai terbesar dan paling produktif di dunia, menyediakan sumber daya alam yang melimpah, termasuk pertanian, perikanan, dan pariwisata (Dang et al., 2021).

Pertama, dari perspektif lingkungan, sungai ini sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan laut dan perubahan pola curah hujan. Penelitian menunjukkan bahwa perubahan iklim dapat memperburuk kondisi hidrologi di Sungai Mekong, yang berpotensi mengancam ketahanan pangan dan kehidupan masyarakat yang bergantung pada sumber daya alam (Whitehead et al., 2019).

Kedua, Sungai Mekong juga berfungsi sebagai titik pertemuan bagi berbagai kepentingan politik dan ekonomi. Negara-negara di kawasan ini, termasuk Vietnam, Kamboja, Laos, dan Thailand, memiliki kepentingan yang berbeda dalam pengelolaan sumber daya air dan pembangunan infrastruktur, seperti bendungan dan irigasi. Ketegangan antara negara-negara ini dapat memicu konflik yang lebih

luas jika tidak dikelola dengan baik, sehingga menjadikan Sungai Mekong sebagai area yang penting untuk diplomasi dan kerjasama internasional (Whitehead et al., 2019).

Ketiga, potensi ekonomi Sungai Mekong yang besar, terutama dalam sektor pertanian dan pariwisata, menjadikannya sebagai area strategis dalam konteks perdagangan internasional. Dengan meningkatnya permintaan global untuk produk pertanian dan ekoturisme, negara-negara di kawasan ini berusaha untuk memanfaatkan sumber daya sungai secara berkelanjutan, yang memerlukan kerjasama lintas batas dan pengelolaan yang efektif (Kondolf et al., 2018)

Dengan demikian, analisis tentang Sungai Mekong dalam konteks hubungan internasional tidak hanya relevan untuk memahami dinamika lingkungan, tetapi juga untuk mengeksplorasi bagaimana isu-isu ekonomi, politik, dan sosial saling terkait di kawasan ini. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan Sungai Mekong memerlukan pendekatan yang holistik dan kolaboratif, yang melibatkan berbagai aktor, baik di tingkat lokal maupun internasional, untuk mencapai keberlanjutan dan stabilitas di kawasan tersebut.

Sebelum terbentuknya *Mekong River Commission* (MRC), pengelolaan sumber daya air di kawasan Sungai Mekong dilakukan melalui *Mekong Committee*, yang dibentuk pada tahun 1957. *Mekong Committee* awalnya dibentuk untuk mengatasi masalah pengelolaan sumber daya air dan pengembangan infrastruktur di sepanjang sungai, termasuk proyek-proyek irigasi dan pembangkit listrik tenaga air. Namun, dalam konteks geopolitik yang kompleks dan konflik yang terjadi di kawasan tersebut, *Mekong Committee* mengalami kesulitan dalam mencapai tujuan kolaboratifnya (Jacobs, 2002).

Mekong Committee berfungsi sebagai platform untuk kerjasama antara negara-negara anggota, yaitu Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam, dalam pengelolaan sumber daya air. Namun, selama periode ini, tantangan yang dihadapi termasuk perbedaan kepentingan nasional, ketidakpastian politik, dan kurangnya dukungan dari negara-negara anggota untuk melaksanakan kebijakan yang telah disepakati. Hal ini menyebabkan *Mekong Committee* tidak dapat secara efektif menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kawasan, seperti pengelolaan banjir, kekeringan, dan degradasi lingkungan (Li et al., 2019).

Sebagai respons terhadap tantangan ini, *Mekong Committee* diubah menjadi *Mekong River Commission* (MRC) pada tahun 1995. Pembentukan MRC ditujukan untuk meningkatkan kerjasama antarnegara dalam pengelolaan sumber daya air dan untuk memberikan kerangka kerja yang lebih formal dan terstruktur dalam menangani isu-isu yang berkaitan dengan sungai. *Mekong River Commission* (MRC) didirikan dengan fokus utama untuk mengelola pengelolaan sumber daya air di kawasan hilir Sungai Mekong, yang melibatkan negara-negara yang berbagi aliran sungai setelah air melewati wilayah China. MRC memiliki mandat untuk memfasilitasi dialog dan kerjasama antara negara-negara anggota, serta untuk mengembangkan kebijakan dan strategi yang berkelanjutan dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan Mekong (Jacobs, 2002).

MRC berfokus pada pengembangan rencana pengelolaan yang berbasis pada data ilmiah dan pengetahuan lokal, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan. Dengan pendekatan ini, MRC berusaha untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi oleh kawasan, seperti pengelolaan risiko banjir dan kekeringan, serta perlindungan terhadap keanekaragaman hayati di Sungai Mekong. MRC juga berperan dalam memfasilitasi penelitian dan pengembangan teknologi yang dapat mendukung pengelolaan sumber daya air yang lebih baik (Jacobs, 2002).

Secara keseluruhan, transisi dari *Mekong Committee* ke MRC mencerminkan upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan sumber daya air di kawasan Mekong, dengan menekankan pentingnya kerjasama antarnegara dan pendekatan yang berbasis pada bukti dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks. MRC berfungsi sebagai platform yang memungkinkan negara-negara anggota untuk bekerja sama dalam mencapai tujuan bersama dalam pengelolaan sumber daya air dan mitigasi dampak perubahan iklim di kawasan ini (Sebesvari et al., 2017).

Penelitian ini dilakukan untuk mengeksplorasi upaya *Mekong River Commission* (MRC) dalam mengatasi masalah perubahan iklim, khususnya dalam konteks banjir disalah satu wilayah Sungai Mekong yaitu bagian Selatan Vietnam. Urgensi penelitian ini sangat tinggi mengingat tantangan lingkungan yang dihadapi oleh kawasan Mekong, termasuk dampak perubahan iklim, pembangunan

infrastruktur yang tidak berkelanjutan, dan penurunan keanekaragaman hayati. Dengan meningkatnya frekuensi bencana alam seperti banjir dan kekeringan, serta ancaman terhadap ketahanan pangan dan sumber daya air, penting untuk memahami bagaimana MRC dapat berfungsi sebagai platform untuk kerjasama antarnegara dalam menghadapi isu-isu ini.

Salah satu wilayah yang mengalami dampak paling nyata adalah Sungai Mekong, terutama di bagian selatan Vietnam. Wilayah ini menghadapi peningkatan signifikan dalam frekuensi dan intensitas banjir, yang dipicu oleh perubahan pola curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta intervensi manusia seperti pembangunan bendungan dan ekstraksi sedimen (Wood et al., 2024).

Data historis menunjukkan bahwa banjir di Sungai Mekong telah mengalami perubahan signifikan dalam beberapa dekade terakhir. Pada tahun 2011, Sungai Mekong mengalami salah satu banjir paling parah dalam satu dekade terakhir, yang menyebabkan kerusakan ekonomi signifikan dan mempengaruhi ribuan rumah tangga di wilayah tersebut (Chinh et al., 2016).

Proyeksi ke depan menunjukkan tren yang semakin mengkhawatirkan. Menurut laporan IPCC tahun 2019, Sungai Mekong di masa depan berisiko tidak hanya dari kenaikan permukaan laut dan erosi tanah, tetapi juga dari pasang tinggi dan siklon. Wilayah ini diproyeksikan mengalami peningkatan badai, yang akan menyebabkan kejadian hujan lebih intens serta tingkat air laut ekstrem akibat gelombang badai yang dipicu oleh siklon tropis (Wood et al., 2024). Sebagian besar dari 40.000 km² sungai berada kurang dari 2 meter di atas permukaan laut, sehingga berisiko tenggelam akibat kenaikan permukaan laut terkait perubahan iklim (IHE Delft, 2023). Faktor risiko tambahan termasuk pemompaan air tanah yang berlebihan dan penambangan pasir yang tidak berkelanjutan untuk konstruksi, serta pengembangan pembangkit listrik tenaga air yang pesat di hulu.

Sebuah studi terbaru mengidentifikasi peningkatan risiko banjir majemuk di Sungai Mekong. Dengan menggunakan model simulasi yang canggih, temuan tersebut menunjukkan bahwa banjir majemuk di masa depan berpotensi menyebabkan banjir yang lebih luas dan lebih lama dibandingkan dengan banjir majemuk yang terjadi saat ini. Temuan ini menyoroti pentingnya pengelolaan

sungai yang lebih baik dan perlunya evaluasi terhadap berbagai opsi untuk memperkuat pertahanan banjir yang ada (Wood et al., 2024).

Data historis banjir di Sungai Mekong yang telah dipaparkan memiliki relevansi signifikan dengan arah kebijakan MRC Strategic Plan 2021-2025, khususnya dalam memprioritaskan ketahanan iklim dan pengelolaan risiko banjir. Kejadian banjir tahun 2011 yang menyebabkan kerusakan ekonomi signifikan, serta fenomena perubahan pola banjir akibat pembangunan tanggul (Triet et al., 2017). Dalam Strategic Plan 2021-2025, MRC secara eksplisit menempatkan "peningkatan ketahanan terhadap kondisi iklim ekstrem" sebagai salah satu hasil prioritas (outcome) yang ditargetkan, dengan indikator keberhasilan berupa penurunan jumlah korban jiwa dan kerugian material akibat banjir (MRC, 2021).

Sungai Mekong merupakan wilayah dengan topografi datar, padat penduduk, dan sangat bergantung pada sektor pertanian dan perikanan. Namun, ketergantungan ini menjadi kerentanan ketika banjir ekstrem melanda. Dalam beberapa dekade terakhir, fenomena banjir telah berubah dari siklus musiman yang dapat diprediksi menjadi bencana yang tidak menentu, merusak infrastruktur, mengancam ketahanan pangan, serta mengganggu penghidupan masyarakat lokal (Hoang et al., 2018).

Menurut MRC Strategic Plan 2021–2025, proyeksi menunjukkan bahwa jika tidak ada upaya mitigasi dan adaptasi yang sistematis, kerugian ekonomi akibat banjir di wilayah Mekong dapat meningkat lima hingga sepuluh kali lipat pada tahun 2040 (MRC, 2021). Permasalahan ini diperparah oleh lemahnya koordinasi lintas negara dalam pengelolaan aliran air dan sedimentasi, serta kurangnya sistem peringatan dini yang responsif (Try et al., 2020).

Untuk merespons kondisi tersebut, *Mekong River Commission* (MRC) melalui Basin Development Strategy 2021–2030 dan Strategic Plan 2021–2025 telah merumuskan berbagai kebijakan dan program untuk meningkatkan ketahanan kawasan terhadap risiko banjir (MRC, 2021). Penelitian ini akan mengevaluasi efektivitas strategi tersebut dalam mengatasi permasalahan banjir ekstrem di Sungai Mekong (MRC, 2021).

MRC memiliki peran strategis dalam mengkoordinasikan upaya mitigasi dan adaptasi di antara negara-negara anggota. Penelitian ini bertujuan untuk

mengevaluasi program-program yang telah dilaksanakan oleh MRC, baik yang berhasil maupun yang tidak, serta untuk mengidentifikasi area yang perlu diperbarui dan ditingkatkan. Dengan memahami dinamika ini, penelitian ini dapat memberikan rekomendasi yang berharga untuk meningkatkan efektivitas MRC dalam menghadapi tantangan lingkungan yang kompleks di kawasan Mekong.

Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya relevan untuk memahami upaya MRC dalam konteks perubahan iklim, tetapi juga untuk memberikan kontribusi pada pengembangan teori dan praktik dalam pengelolaan sumber daya air di kawasan transboundary. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang berguna bagi pembuat kebijakan, akademisi, dan pemangku kepentingan lainnya dalam upaya mencapai keberlanjutan dan ketahanan lingkungan di Sungai Mekong.

1.2. Pertanyaan Penelitian

Mengacu pada latar belakang yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana *Mekong River Commission* (MRC) dapat mengatasi masalah perubahan iklim di Vietnam?
2. Bagaimana kondisi Sungai Mekong terkait dengan banjir di Vietnam?
3. Bagaimana implementasi program Mekong River Commission (MRC) dalam mengatasi dampak perubahan iklim di Sungai Mekong, khususnya di Vietnam?

1.3. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dibatasi pada periode implementasi MRC Strategic Plan 2021-2025, dengan fokus pada upaya adaptasi dan mitigasi risiko banjir ekstrem di Sungai Mekong, Vietnam. Pembatasan fokus pada wilayah Vietnam didasarkan pada tingkat kerentanan yang signifikan di area ini, di mana 40.000 km² Sungai Mekong terletak kurang dari 2 meter di atas permukaan laut, menjadikannya salah satu hotspot kerentanan perubahan iklim global (Smajgl et al., 2015). Meskipun Sungai Mekong mengalir melalui enam negara, penelitian ini secara khusus menganalisis implementasi kebijakan MRC di Vietnam. Yang pertama karena Sungai Mekong di Vietnam merupakan wilayah paling hilir yang menerima

dampak kumulatif dari aktivitas hulu, yang kedua menurut proyeksi IPCC (2022), Sungai Mekong akan mengalami peningkatan risiko banjir majemuk hingga lima kali lipat pada tahun 2050, dan yang ketiga keterbatasan penelitian dalam mengakses data dan analisis yang komprehensif untuk seluruh kawasan. Dengan demikian, pembatasan ini memungkinkan analisis yang lebih mendalam terhadap efektivitas strategi MRC dalam konteks lokal yang spesifik, sambil tetap mengakui keterkaitan dalam konteks regional yang lebih luas.

1.4. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.4.1 Tujuan Penelitian

1. Mendeskripsikan upaya Mekong River Commission (MRC) dalam menangani masalah perubahan iklim di Vietnam.
2. Mendeskripsikan kondisi Sungai Mekong terkait dengan banjir di Vietnam.
3. Menganalisis implementasi program Mekong River Commission (MRC) dalam mengatasi dampak perubahan iklim di Sungai Mekong, khususnya di Vietnam.

1.4.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Penelitian Secara teoritis, penelitian ini memperkaya kajian hubungan internasional dalam konteks keamanan lingkungan dan tata kelola sumber daya air lintas negara (Matthew & Floyd, 2013). Secara praktis, hasil penelitian dapat menjadi masukan bagi pengambil kebijakan di tingkat regional dan nasional untuk memperkuat kerja sama dan efektivitas strategi mitigasi banjir.
2. Penelitian ini ditujukan sebagai syarat dalam menempuh program studi S-1. Dengan membuat suatu karya ilmiah yang menjadi salah satu syarat kelulusan program studi Ilmu Hubungan Internasional di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik (FISIP) Universitas Pasundan.

1.5. Kerangka Teoritis

1.5.1. Environmental Security

Teori Keamanan Lingkungan (Environmental Security) merujuk pada hubungan antara ancaman terhadap lingkungan dan stabilitas politik serta sosial, yang dapat memengaruhi ketahanan negara dan individu. Menurut Richard A. Matthew dan Rita Floyd (2013), Keamanan Lingkungan mengakui bahwa

perubahan iklim dan kerusakan lingkungan dapat menjadi ancaman yang memengaruhi seluruh aspek keamanan, baik di tingkat nasional, regional, maupun global. Teori ini menekankan bahwa kerusakan lingkungan, seperti perubahan iklim yang menyebabkan bencana alam dan degradasi sumber daya alam, dapat memperburuk ketegangan antarnegara dan memicu konflik, terutama di wilayah yang saling bergantung pada sumber daya alam bersama, seperti perairan lintas batas atau kawasan ekosistem penting (Matthew & Floyd, 2013).

Keamanan Lingkungan mengusulkan pendekatan holistik yang tidak hanya memandang ancaman lingkungan sebagai masalah ekologis, tetapi juga sebagai ancaman terhadap kestabilan politik dan sosial. Matthew dan Floyd (2013) menegaskan bahwa perubahan iklim dapat memperburuk ketegangan antara negara yang berbagi sumber daya alam yang terbatas, dan oleh karena itu memerlukan kerjasama internasional untuk mengelola dampak perubahan iklim secara efektif (Matthew & Floyd, 2013). Konsep ini relevan dengan kebijakan adaptasi iklim yang dijalankan oleh *Mekong River Commission* (MRC), di mana negara-negara anggota berusaha meningkatkan ketahanan terhadap perubahan iklim melalui kerjasama lintas batas untuk mengelola sumber daya alam Sungai Mekong.

Keamanan Lingkungan juga menggarisbawahi pentingnya adaptasi terhadap perubahan iklim dalam menjaga ketahanan negara dan manusia dari ancaman bencana alam. Matthew dan Floyd (2013) menekankan bahwa kebijakan adaptasi harus melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk mengurangi risiko yang ditimbulkan oleh perubahan iklim, serta memperkuat kapasitas negara-negara yang paling rentan terhadap dampaknya (Matthew & Floyd, 2013). Hal ini relevan dengan upaya yang dilakukan MRC untuk mendorong kerjasama antarnegara anggota dalam menghadapi tantangan perubahan iklim yang mempengaruhi keberlanjutan ekosistem Sungai Mekong, serta untuk mengurangi potensi konflik yang timbul akibat ketidakpastian sumber daya alam yang terbatas.

Teori Keamanan Lingkungan (Environmental Security) merupakan kerangka analitis yang menjembatani hubungan kompleks antara perubahan lingkungan dan stabilitas sosial-politik. Dalam konteks Sungai Mekong, fenomena banjir ekstrem akibat perubahan iklim menciptakan "insecurity multiplier effect" yang mengancam ketahanan pangan, infrastruktur kritis, dan sumber penghidupan jutaan

penduduk di Sungai Mekong. Konsep ini sangat relevan untuk menganalisis upaya MRC dalam merespons risiko banjir, karena memberikan kerangka untuk mengevaluasi bagaimana strategi adaptasi MRC tidak hanya berfokus pada dimensi fisik banjir, tetapi juga implikasinya terhadap ketahanan sosial-ekonomi. Keamanan lingkungan mencakup dimensi keadilan, di mana beban dan manfaat dari kebijakan adaptasi seharusnya didistribusikan secara proporsional di antara negara-negara yang terlibat (Matthew & Floyd, 2013). Perspektif teoritis ini memungkinkan peneliti menganalisis sejauh mana MRC Strategic Plan 2021-2025 mengintegrasikan pertimbangan keamanan lingkungan dalam mekanisme koordinasi lintas batas untuk pengelolaan risiko banjir di Sungai Mekong.

1.5.2. Transboundary Resource Management

Konsep Pengelolaan Sumber Daya Alam Lintas Batas (TBNRM) merujuk pada pengelolaan sumber daya alam yang melintasi batas negara atau wilayah, yang melibatkan kerjasama antara negara atau kelompok yang memiliki kepentingan yang saling berhubungan terhadap sumber daya tersebut. Menurut Griffin (2003), TBNRM adalah pendekatan kolaboratif dalam pengelolaan sumber daya alam yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan yang berada di kedua sisi batas negara. Pendekatan ini mengharuskan pihak-pihak yang terlibat untuk bekerja sama dalam mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan dan mengurangi ketegangan yang mungkin timbul akibat perbedaan kepentingan antar negara atau wilayah.

TBNRM berfokus pada pembentukan kemitraan yang efektif antara berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat lokal, dan sektor swasta. Keberhasilan TBNRM bergantung pada sejauh mana para pemangku kepentingan dapat membangun dan mempertahankan kemitraan yang efektif. Hal ini tidak hanya berfungsi untuk meningkatkan pengelolaan ekosistem regional secara lebih efisien, tetapi juga untuk meningkatkan peluang ekonomi, mengurangi isolasi budaya, dan bahkan mempromosikan perdamaian dan kerjasama di bidang-bidang lain yang lebih sensitif secara politik.

TBNRM dapat meningkatkan pengelolaan ekologi regional, memperkuat hubungan sosial-ekonomi antar negara atau kawasan, dan memperbaiki mekanisme penyelesaian konflik (Griffin, 2003). Sebagai contoh, dalam konteks kawasan yang dilanda ketegangan politik atau sosial, pendekatan TBNRM dapat mengurangi

ketegangan tersebut melalui kolaborasi berbasis kepentingan bersama dalam pengelolaan sumber daya alam. Hal ini relevan dalam pengelolaan Sungai Mekong, yang melibatkan beberapa negara dengan kepentingan yang sering kali bertentangan terkait penggunaan dan pengelolaan air serta sumber daya alam lainnya.

Selain itu, TBNRM juga mencakup pengelolaan kawasan konservasi bersama seperti koridor ekologi lintas batas, yang menjadi penting dalam menjaga keanekaragaman hayati dan keberlanjutan ekosistem. Pendekatan ini juga berfokus pada pengembangan keterampilan organisasi dan kemampuan manajerial di antara praktisi konservasi untuk meningkatkan efektivitas kolaborasi dan mencapai hasil yang saling menguntungkan bagi semua pihak yang terlibat.

Teori Pengelolaan Sumber Daya Lintas Batas (Transboundary Resource Management/TBNRM) menyediakan kerangka analitis untuk memahami dinamika kerjasama dalam pengelolaan ekosistem bersama yang melampaui batas negara. TBNRM sebagai pendekatan kolaboratif yang memfasilitasi kerjasama multipihak dalam mengelola sumber daya alam yang terbagi di antara dua atau lebih yurisdiksi politik (Griffin, 2003). Dalam konteks Sungai Mekong, kerangka teori ini sangat relevan karena aliran sungai yang melewati enam negara menciptakan interdependensi hidrologis yang kompleks, di mana keputusan pengelolaan di satu negara berdampak langsung pada negara lain. TBNRM menekankan pentingnya institusi formal seperti MRC dalam mengembangkan mekanisme tata kelola yang efektif, memfasilitasi pertukaran informasi, dan memitigasi konflik potensial terkait sumber daya air. Dengan mengaplikasikan kerangka TBNRM, penelitian ini dapat mengevaluasi sejauh mana MRC berhasil membangun kapasitas adaptif institusional dan harmonisasi kebijakan antarnegara dalam implementasi strategi mitigasi banjir di Sungai Mekong.

Dengan demikian, TBNRM bukan hanya sebuah konsep untuk pengelolaan sumber daya alam lintas batas, tetapi juga merupakan platform yang memungkinkan berbagai negara atau wilayah untuk bekerja bersama dalam menciptakan solusi pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan, sambil mengatasi tantangan politik dan sosial yang mungkin timbul.

1.5.3. Multilateralisme

Teori Multilateralisme, yang dikembangkan secara komprehensif oleh Ruggie (1992), menawarkan kerangka analisis untuk memahami kerjasama institusional antara tiga atau lebih negara berdasarkan prinsip-prinsip perilaku yang digeneralisasi. Ruggie mendefinisikan multilateralisme sebagai "bentuk institusional yang mengkoordinasikan hubungan antara tiga atau lebih negara berdasarkan prinsip-prinsip umum yang menentukan perilaku yang tepat untuk suatu kelas tindakan, terlepas dari kepentingan partikular para pihak atau tuntutan strategis yang mungkin ada dalam situasi tertentu." Dalam konteks ini, multilateralisme tidak hanya merujuk pada pengaturan formal, tetapi juga pada seperangkat norma dan prinsip yang mengatur interaksi antar negara, termasuk prinsip non-diskriminasi, ketidakterpisahan (indivisibility), dan resiprositas difusi yang menjadi fondasi kerjasama internasional dalam mengelola masalah transnasional seperti perubahan iklim dan pengelolaan sumber daya air lintas batas (Ruggie, 1992).

Mekong River Commission (MRC) merepresentasikan perwujudan multilateralisme dalam pengelolaan sumber daya air Sungai Mekong melalui koordinasi empat negara anggota (Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam). Meskipun tidak berada di bawah naungan ASEAN, MRC mengembangkan kerangka institusional multilateral yang berfokus secara spesifik pada pengelolaan bersama Sungai Mekong. Karakter multilateral MRC tercermin dalam struktur pengambilan keputusan, mekanisme pembagian informasi, dan pengembangan kerangka kebijakan bersama seperti MRC Strategic Plan 2021-2025. Namun, tantangan signifikan dalam multilateralisme MRC, yakni keterlibatan terbatas Tiongkok dan Myanmar yang hanya sebagai partner dialog, meskipun kedua negara tersebut memiliki pengaruh determinan terhadap dinamika hidrologis di hulu sungai, termasuk dalam konteks perubahan iklim dan pembangunan bendungan yang mempengaruhi aliran air.

Dalam konteks penelitian ini, teori multilateralisme menyediakan lensa analitis untuk mengevaluasi efektivitas MRC Strategic Plan 2021-2025 dalam mengkoordinasikan kebijakan adaptasi perubahan iklim dan mitigasi banjir di Sungai Mekong. Multilateralisme memungkinkan analisis yang lebih komprehensif tentang bagaimana MRC memfasilitasi harmonisasi standar teknis antar negara,

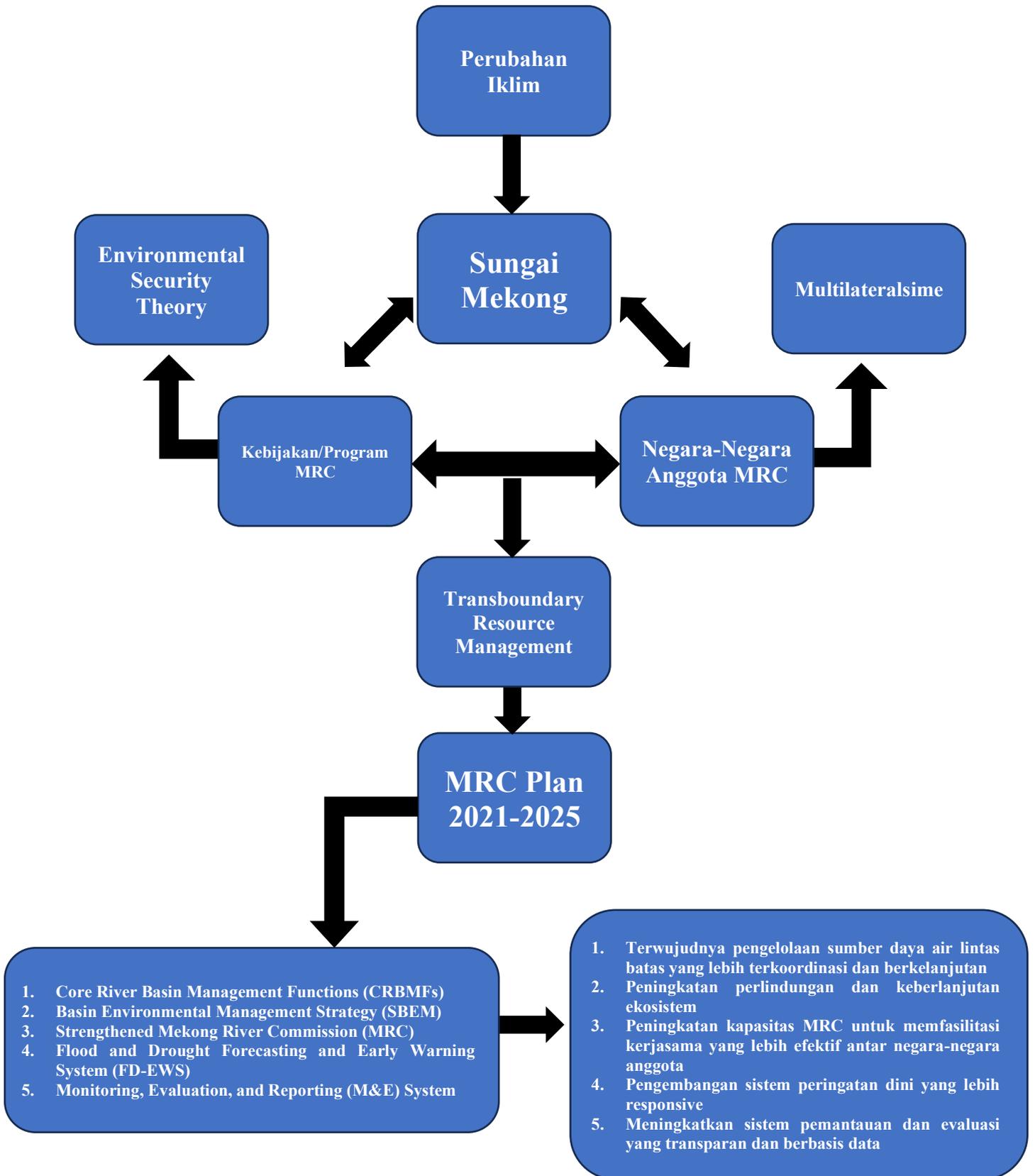
membangun sistem peringatan dini banjir lintas batas, dan mengembangkan mekanisme pembagian data hidrometeorologi. Melalui perspektif multilateralisme, penelitian ini dapat mengeksplorasi sejauh mana prinsip-prinsip kerjasama multilateral diimplementasikan dalam strategi praktis penanganan banjir, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas implementasi, termasuk asimetri kekuatan antar negara anggota, kepentingan nasional yang berpotensi bertentangan, dan kapasitas institusional MRC dalam menyelaraskan beragam prioritas nasional ke dalam kerangka aksi kolektif untuk meningkatkan ketahanan terhadap banjir di Sungai Mekong.

1.6. Asumsi Penelitian

Dalam penelitian ini, asumsi yang diambil adalah:

1. Banjir ekstrem di Sungai Mekong, khususnya di Vietnam, merupakan akibat dari kombinasi antara perubahan iklim yang memperburuk pola cuaca dan pembangunan infrastruktur yang tidak memperhitungkan dampak ekologis dan sosial, seperti pembangunan bendungan dan perubahan aliran sungai.
2. Kondisi Sungai Mekong di Vietnam, terutama terkait dengan dampak banjir, dipengaruhi oleh faktor perubahan iklim yang meningkatkan frekuensi dan intensitas hujan ekstrem serta dampak pembangunan infrastruktur yang tidak terkoordinasi antar negara yang berbagi sumber daya sungai.
3. Implementasi program Mekong River Commission (MRC) dalam mengatasi dampak perubahan iklim di Sungai Mekong, khususnya di Vietnam, akan efektif jika dilaksanakan dengan koordinasi lintas negara yang baik, didukung oleh data ilmiah yang kuat dan pengetahuan lokal yang relevan dalam kebijakan mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan iklim.

1.7. Kerangka Analisis



Kerangka analisis rencana Mekong River Commission (MRC) untuk periode 2021-2025 menggambarkan sebuah pendekatan komprehensif dalam mengelola sumber daya air Sungai Mekong yang kompleks dan dinamis. Diagram ini menunjukkan hubungan strategis antara berbagai faktor kunci yang saling terkait, dimulai dari perubahan iklim sebagai pemicu utama yang mempengaruhi dinamika sungai.

Perubahan iklim menjadi titik awal yang signifikan, memiliki dampak langsung pada Sungai Mekong. Hal ini kemudian memicu respons dari negara-negara anggota MRC dan kerangka kebijakan yang ada. Melalui pendekatan teori keamanan lingkungan (Environmental Security Theory), MRC mengembangkan strategi pengelolaan sumber daya lintas batas (Transboundary Resource Management) yang komprehensif, dan menggunakan teori Multilateralisme

Rencana MRC 2021-2025 dibangun atas enam prinsip utama, yang mencakup upaya mitigasi perubahan iklim, keberlanjutan lingkungan, kerja sama lintas negara, dan pengembangan kebijakan bersama. Kerangka ini menekankan pendekatan holistik dalam mengelola ekosistem Sungai Mekong, yang mempertimbangkan kompleksitas lingkungan, sosial, dan ekonomi dari wilayah tersebut.

Melalui kerangka analisis ini, MRC berupaya menciptakan mekanisme kerja sama yang berkelanjutan antara negara-negara anggota, dengan fokus pada adaptasi terhadap perubahan iklim, pengelolaan sumber daya air yang efektif, dan menjaga keseimbangan ekosistem Sungai Mekong yang rentan ini